

## **EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

Yahya Zahid Ismail  
Dosen STIT Sunan Giri Trenggalek  
Email: [yahyazahid08@gmail.com](mailto:yahyazahid08@gmail.com)

### ***Abstract***

*the concept of educational evaluation in improving the quality of islamic education, includes: (1) efforts to obtain a strong basis for considering the end of a work period, what has been achieved, what has not been achieved, and what needs special attention; (2) to guarantee an effective and efficient way of working that brings the organization to the use of educational resources (human/manpower, facilities/infrastructure, costs) in economic efficiency; (3) to obtain facts about difficulties, obstacles, deviations seen from certain aspects, for example the annual program, learning progress. While the Implementation of the control function in improving the quality of islamic education, are as follows: (1) determine the standards or basis for conducting control; (2) measuring work implementation; (3) comparing performance with standards and determining deviations if they occur or exist; (4) carry out corrective actions if there are deviations so that the implementation and objectives are in accordance with the plan. Follow-up to determine the strategic management of islamic education institutions in facing improved quality and competitiveness, at least the institution must do the following: (1) good subject matter; (2) good educational planning; (3) good governance; (4) quality education also comes from qualified teachers.*

**Keywords:** *Evaluation and Control, Increasing Quality and Competitiveness, Islamic Education Institutions*

### **Abstrak**

Konsep evaluasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, meliputi: (1) upaya untuk memperoleh dasar kuat bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus; (2) untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa

organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia/tenaga, sarana/prasarana, biaya) secara efisiensi ekonomis; (3) untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu, misalnya program tahunan, kemajuan belajar. sedangkan pelaksanaan fungsi kontrol dalam meningkatkan mutu pendidikan islam, adalah sebagai berikut: (1) menentukan standar-standar atau dasar untuk melakukan kontrol; (2) mengukur pelaksanaan kerja; (3) membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan deviasi-deviasi bila terjadi atau ada; (4) melakukan tindakan-tindakan perbaikan-perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. tindak lanjut untuk menentukan manajemen strategi lembaga pendidikan islam dalam menghadapi peningkatan mutu dan daya saing, paling tidak lembaga harus melakukan hal sebagai berikut: (1) materi pelajaran yang baik; (2) perencanaan pendidikan yang baik; (3) tata kelola yang baik; (4) Pendidikan yang bermutu juga dari guru yang bermutu.

Kata kunci: Evaluasi dan Pengendalian, Peningkatan Mutu dan Daya Saing, Lembaga Pendidikan Islam

## A. Pendahuluan

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.<sup>1</sup> Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

---

<sup>1</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, *Manajemen*, diakses dari <http://www.ririsatria.net/category/manajemen-organisasi>, tanggal 7 Juni 2023.

Pada dasarnya pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut haruslah berorientasi pada peningkatan mutu, tanpa berorientasi pada peningkatan mutu, maka pelaksanaan fungsi manajemen hanyalah sebagai formalitas belaka. Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.<sup>2</sup> Mutu pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.<sup>3</sup> Dalam konteks pendidikan, menurut Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip Mulyasa, pengertian mutu mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan.<sup>4</sup> Jadi yang dinamakan mutu adalah kualitas, maka mutu pendidikan Islam adalah kualitas pendidikan Islam. Dengan demikian, kegiatan manajemen yang mencerminkan pada mutu yaitu manajemen yang fungsi-fungsinya bercerminkan kualitas, baik itu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*.

Salah satu fungsi manajemen yang menarik untuk dicermati adalah *controlling*. Fungsi ini merupakan fungsi manajemen yang terakhir. Fungsi ini merupakan fungsi yang bertugas untuk mengevaluasi fungsi-fungsi sebelumnya. Dan fungsi ini berguna sebagai *feedback* bagi *planning* ke depan. Fungsi ini haruslah berjalan dengan bercermin pada kualitas suatu pendidikan. Jadi *controlling* tersebut harus mampu mengubah atau memperbaiki manajemen menjadi lebih baik.

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep Evaluasi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam**

---

<sup>2</sup> Jarome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terj. Yosai Triantara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 75.

<sup>3</sup> Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 159.

<sup>4</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 76.

a. Evaluasi Program Dalam Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Evaluasi adalah pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Morisson, ada tiga faktor penting dalam konsep evaluasi, yaitu pertimbangan deskripsi objek penelitian, dan kriteria yang bertanggung jawab. Evaluasi mempunyai kaitan yang erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai/menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Penilaian ini dilakukan untuk mengukur hasil dan mutu program yang telah dicapai, untuk memodifikasi program, untuk mendapatkan dokumen proses dan standar, untuk melihat pola dan proses komunikasi di sekolah tersebut dan menganalisis biaya dibandingkan mafaat yang diperoleh atau analisis efektivitas, efisiensi dan produktivitas program yang telah dilaksanakan.

Dalam hubungannya dengan manajemen pendidikan, tujuan evaluasi antara lain:

- 1) untuk memperoleh dasar kuat bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.
- 2) untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia/tenaga, sarana prasarana, biaya) secara efisiensi ekonomis.
- 3) untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu, misalnya program tahunan, kemajuan belajar.<sup>5</sup>

Evaluasi yang dilaksanakan dalam bidang manajemen tersebut mempunyai manfaat untuk:

- 1) memperoleh data yang telah diolah dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang, meliputi aspek-aspek perencanaan, organisasi, bimbingan, pengarahan, dan lain-lain termasuk juga kegiatan-kegiatan profesional.
- 2) memperoleh cara bekerja yang paling efisiensi dan efektif atau yang paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- 3) memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi agar dapat dikurangi atau dihindari.
- 4) memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha mengembangkan organisasi dan personal dalam berbagai bidang.
- 5) mengetahui berapa jauh tujuan telah dicapai.<sup>6</sup>

Tingkat evaluasi:

- 1) pra evaluasi, ada hubungan dengan pengarahan suatu proyek. misalnya, perlu ada manajemen yang baik agar proyek/program dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana.
- 2) evaluasi antara, adalah evaluasi pada pertengahan implementasi, yaitu evaluasi ketika program atau proyek sedang mengatasi

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 108.

<sup>6</sup> Sulhan, *Administrasi Pendidikan...*, hlm. 29.

masalah. hasil ini dapat dipakai untuk memodifikasi perencanaan atau strategi program/proyek. Misal, merubah sifat input, memodifikasi model intervensi dan menggeser penekanan atau kelompok target.

- 3) evaluasi akhir, adalah evaluasi ketika pembiayaan proyek tersebut berakhir. Evaluasi ini memberikan persepsi manfaat program dan dampak terhadap kegiatan. Rekomendasi ini adalah untuk memperbaiki perencanaan selanjutnya dan memiliki hubungan dengan kebijakan.

#### b. Konsep Evaluasi Pendidikan

Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat di butuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui, dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan serta mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik ke depan. Tanpa evaluasi, kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan siswa, dan tanpa evaluasi pula kita tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik, maka dari itu secara umum evaluasi adalah suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program.

Evaluasi pendidikan dan pengajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Hasilnya diperlukan untuk membuat berbagai putusan dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>7</sup>

Evaluasi pendidikan memberikan manfaat baik bagi siswa/peserta pendidikan, pengajar maupun manajemen. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana

---

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto: *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 32.

keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi dimana siswa mendapatkan nilai yang memuaskan maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus, motivator agar siswa dapat lebih meningkatkan prestasi. Pada kondisi dimana hasil yang dicapai tidak memuaskan maka siswa akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar, namun demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru/pengajar agar siswa tidak putus asa. Dari sisi pendidik, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik (*feed back*) untuk menetapkan upaya-upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dimiyati mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses sederhana memberikan/menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek dan masih banyak yang lain. Evaluasi pendidikan merupakan suatu tindakan atau kegiatan atau proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Atau singkatnya, evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya.<sup>8</sup> Menurut Oemar Hamalik, Evaluasi pendidikan merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. artinya evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.<sup>9</sup> Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan dalam perbaikan, penambahan, atau pengembangan ke arah yang lebih efektif dan efisien serta berhasil guna. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Anas Sudijono, dengan batasan

---

<sup>8</sup>Dimiyati dan Mudjiono: *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Kerjasama Depdikbud dan PT Rineka Cipta, 2006), 78.

<sup>9</sup>Oemar Hamalik: *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Kerjasama Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 69.

sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan unjuk kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria, namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Jadi evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur (pengukuran) baru melakukan proses menilai (penilaian) tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Pengukuran lebih menekankan kepada proses penentuan kuantitas sesuatu melalui membandingkan dengan satuan ukuran tertentu. Sedangkan penilaian menekankan kepada proses pembuatan keputusan terhadap sesuatu ukuran baik-buruk yang bersifat kualitatif.

Dari batasan pengukuran dan penilaian yang telah diterangkan di atas, dapat diketahui adanya perbedaan yang nyata antara keduanya. Pengukuran dilakukan apabila penilaian membutuhkannya, bila kegiatan penilai tidak membutuhkan maka kegiatan pengukuran tidak perlu dilakukan. Hasil pengukuran yang bersifat kuantitatif akan diolah dan dibandingkan dengan kriteria, hingga didapatkan hasil penilaian yang bersifat kualitatif. Lalu, seperti kita ketahui bahwa program pendidikan terdiri dari berbagai jenis dan tingkat. Menurut jenisnya terdapat program pemerintah, program lembaga masyarakat, program orang tua, serta program peserta didik. Dari segi tingkatannya, program pemerintah bertingkat mulai dari pusat sampai ke ruang kelas. Karena itu membicarakan evaluasi pendidikan akan berkaitan dengan program pendidikan yang ada di berbagai jenis dan tingkat pendidikan.

---

<sup>10</sup>AnasSudijono : *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 17.

Evaluasi program pendidikan di tingkat pusat sampai tingkat sekolah lebih banyak berkenaan dengan mekanisme pengelolaan dan biasanya tidak berkenaan dengan kegiatan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, seringkali diistilahkan dengan penilaian program tingkat makro. Sedangkan penilaian terhadap program di tingkat kelas yang dipendikannya langsung berinteraksi dengan peserta didik, biasanya disebut penilaian tingkat mikro. Namun demikian, pembagian ini hanya untuk memudahkan analisis dan tidaklah salah jika ada yang ingin mengkategorikan penilaian di tingkat kelas sebagai tingkat makro.

Tujuan penilaian di tingkat makro maupun mikro tetap, yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi program yang selanjutnya dapat dipergunakan baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun untuk pengambilan berbagai keputusan khususnya di bidang perencanaan. Pertanggungjawaban perlu diberikan secara periodik terhadap pihak atasan dan atau sponsor dari program. Dalam hal ini, pelaksana di ruang kelas bertanggung jawab kepada penanggung jawab program di tingkat sekolah. pemimpin sekolah bertanggung jawab kepada yang lebih atas lagi, dst. sampai akhirnya berupa pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Selain itu, karena pelaksana tingkat kelas dan sekolah berinteraksi langsung dengan peserta didik dan orang tua mereka, maka pertanggungjawaban dalam berbagai manifestasinya biasanya juga diberikan kepada murid dan orang tua mereka. Misalnya, dalam bentuk laporan kemajuan hasil belajar.

Begitu pula halnya dengan pengambilan keputusan. pada tingkat makro, keputusan yang diambil biasanya berkenaan dengan strategi dan pengelolaan pendidikan, sedangkan pada tingkat mikro adalah keputusan yang berkenaan dengan penyempurnaan proses belajar-mengajar. Baik pada tingkat makro, meso maupun mikro, keputusan untuk tujuan penyempurnaan dapat dilakukan bagi program yang masih berjalan maupun bagi siklus program berikutnya. perlu diketahui bahwa khusus dalam dunia pendidikan, penilaian terhadap satuan-satuan program yang lebih

kecil, yang dilakukan dalam rangka pengendalian program lebih besar yang masih berjalan merupakan fungsi penilaian formatif. Sedangkan evaluasi yang dilakukan setelah keseluruhan program selesai merupakan fungsi penilaian sumatif. Menurut Malik Fadjar, diperlukan strategi peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan (*broad based education*)<sup>11</sup> dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademik (*high based education*).<sup>12</sup> Dengan demikian, maka evaluasi yang merupakan bagian fungsi kontrol yang berbasis mutu dapat dijalankan.

Proses evaluasi akan menghasilkan informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Di sini ada empat keputusan pendidikan yang perlu dipertimbangkan:

- 1) perencanaan keputusan yang terfokus pada perbaikan;<sup>13</sup>
- 2) pemrograman keputusan yang berkenaan dengan prosedur; personal, fasilitas, budget, dan waktu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan;
- 3) pelaksanaan keputusan yang mengarahkan kegiatan-kegiatan yang diprogram;
- 4) program perbaikan keputusan yang meliputi *terminating, continuing, evolving* atau *modifying activities*.

Sehubungan dengan dengan jenis-jenis keputusan tersebut, maka perlu dipertimbangkan empat jenis strategi evaluasi, yakni:

- 1) evaluasi kebutuhan dan kelayakan;
- 2) evaluasi input atau masukan;
- 3) evaluasi proses;
- 4) evaluasi produk.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> A. Malik Fadjar, *Holistika pemikiran Pendidikan*, ed. Ahmad Barizi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 269

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 271.

<sup>13</sup>Udin Syaefudin, dan M. Abin Syamsuddin: *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif* (Bandung: Kerjasama PPs UPI dengan PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 68.

<sup>14</sup>Supardi dan Darwyan Syah, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Diadit Media, 2010), hlm. 98.

Fungsi Evaluasi Pendidikan Sangat diperlukan dalam pendidikan antara lain memberi informasi yang dipakai sebagai dasar untuk:

- 1) membuat kebijaksanaan dan keputusan;
- 2) menilai hasil yang dicapai para pelajar;
- 3) menilai kurikulum;
- 4) memberi kepercayaan kepada sekolah;
- 5) memonitor dana yang telah diberikan;
- 6) memperbaiki materi dan program pendidikan.

## 2. Pelaksanaan Fungsi Kontrol dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

### a. Definisi, Tujuan, Prinsip-Prinsip dan Proses Kontrol dalam Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Secara etimologis "*controlling*" lazimnya diterjemahkan dengan "pengendalian"<sup>15</sup> atau pengawasan. George R. Terry merumuskan pengendalian sebagai suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan Konntz & O'Donnell mengartikan bahwa pengendalian atau pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara dengan baik.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Sulhan, kontrol atau pengawasan adalah kegiatan mengukur efektifitas kerja personel dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan.<sup>17</sup> Menurut Siagian, sebagaimana yang dikutip Sulistiyorini, fungsi pengawasan yaitu upaya penyesuaian antara rencana yang telah disusun dengan pelaksanaan atau hasil yang benar-

---

<sup>15</sup> Marno dan Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 24.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

<sup>17</sup> Muwahid Sulhan, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bina Ilmu, 2005), hlm. 28.

benar dicapai.<sup>18</sup> Jadi yang dinamakan pengendalian atau kontrol atau pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengukur dan meneliti juga mengoreksi pelaksanaan suatu rencana yang telah disusun agar berjalan dengan efektif. Maka kontrol yang berorientasi pada peningkatan mutu adalah sistem kontrol yang kegiatannya sebagai tonggak dasar peningkatan mutu dan pelaksanaan sistem tersebut berorientasi pada kaidah-kaidah mutu.

Bertolak dari definisi di atas, ada beberapa unsur yang perlu diketahui dalam proses pengendalian atau kontrol ini, antara lain:

- 1) adanya proses dalam menetapkan pekerjaan yang telah dan akan dikerjakan
- 2) merupakan alat untuk menyuruh orang bekerja menuju sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
- 3) memonitor, menilai dan mengoreksi pelaksanaan pekerjaan.
- 4) menghindarkan dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan dan penyalahgunaan.
- 5) mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kerja
- 6) berorientasi pada peningkatan mutu dan sebagai alat *feedback*.

Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem.<sup>19</sup> Sedangkan berdasarkan definisi di atas, tujuan kontrol adalah menilai pelaksanaan dan penyesuaian dengan perencanaan yang digunakan sebagai *feedback* dalam perencanaan berikutnya yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam. Di samping itu, tujuan pengawasan adalah untuk membantu menegakkan agar prosedur, program, standar dan peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi lembaga pendidikan Islam setinggi-tingginya.<sup>20</sup>

Menurut Winardi, prinsip pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai

---

<sup>18</sup> Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Surabaya: eLKAF, 2005), hlm. 23.

<sup>19</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103.

<sup>20</sup> Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 24.

dengan rencana.<sup>21</sup> Sementara itu Harool Koontz & Cyrill O'Donnell, sebagaimana yang dikutip Marno mengemukakan prinsip pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) prinsip tercapainya tujuan, pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindarkan penyimpangan dari perencanaan.
- 2) prinsip efisiensi pengendalian. pengendalian efisiensi ini bertujuan untuk menghindarkan deviasi-deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.
- 3) prinsip tanggung jawab pengendalian. pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila manajer dapat bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana.
- 4) prinsip pengendalian terhadap masa depan. Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan, penyimpangan, perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang.
- 5) prinsip pengendalian langsung. teknik kontrol yang paling efektif adalah manajer mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik.
- 6) prinsip refleksi perencanaan. pengendalian harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
- 7) prinsip penyesuaian dengan organisasi. pengendalian harus sesuai dengan struktur organisasi.
- 8) prinsip pengendalian individual. pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer.
- 9) prinsip standar. kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang dicapai.
- 10) prinsip pengawasan terhadap strategis. pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan perhatian yang ditentukan terhadap faktor-faktor yang strategis.

---

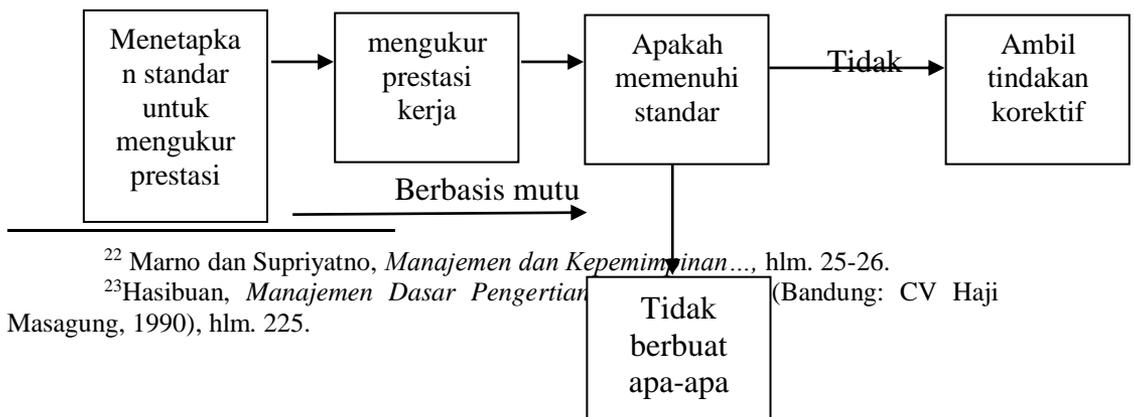
<sup>21</sup>Winardi, *Azas-Azas Manajemen* (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 380.

- 11) prinsip perkecualian. efisiensi dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor perkecualian. perkecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.
- 12) prinsip pengendalian fleksibel. pengendalian harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
- 13) prinsip peninjauan kembali. sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- 14) prinsip tindakan. Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana organisasi, *staffing* dan *directing*.<sup>22</sup>

Pengendalian dapat dilakukan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Seorang manajer dapat melakukan fungsi pengendalian dengan baik, jika mengetahui secara jelas proses pengendalian tersebut. Salah pendapat yang sering dipakai di kalangan para ahli di Indonesia adalah pendapat Hasibuan. Menurutnya tahap-tahap pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) menentukan standar-standar atau dasar untuk melakukan kontrol.
- 2) mengukur pelaksanaan kerja.
- 3) membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan deviasi-deviasi bila terjadi atau ada;
- 4) melakukan tindakan-tindakan perbaikan-perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.<sup>23</sup>

Tahap proses kontrol ini dijelaskan oleh skema sebagai berikut:



<sup>22</sup> Marno dan Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan...*, hlm. 25-26.

<sup>23</sup> Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian* (Bandung: CV Haji Masagung, 1990), hlm. 225.

ya

### Bagan 1.

Hal yang perlu diingat dan ditanamkan adalah orientasi mutu dalam setiap langkah dan tahap yang dilakukan pada saat melakukan fungsi kontrol. Tanpa orientasi mutu, maka sama dengan proses kontrol biasa saja.

#### b. Konsep Sistem Kontrol dalam Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Kalau ditelaah menurut paham klasik, pengawasan merupakan *coercion* atau *compelling* artinya proses yang bersifat memaksa-maksa agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut konsep sistem didasarkan kepada kesadaran yang bersifat *cibernetik* atau sistem *cybernetic*, yaitu sistem kesadaran yang memandang organisasi atau ekosistem sebagai mesin homeostatic yang bekerja secara otomatis.<sup>24</sup> Paham pengawasan ini seperti thermostat merupakan sebuah sistem yang mengatur diri sendiri. Prinsip dasar yang menjadi kunci dalam sistem pengawasan adalah *feedback*. Jadi pengawasan dalam konsep sistem ini menekankan pada adanya *feedback* setelah pengawasan yang berasal dari laporan hasil pengawasan. Umpan balik tersebut ditujukan kepada pimpinan lembaga untuk mengevaluasi kegiatan dan sebagai tonggak untuk mengadakan perencanaan berikutnya.

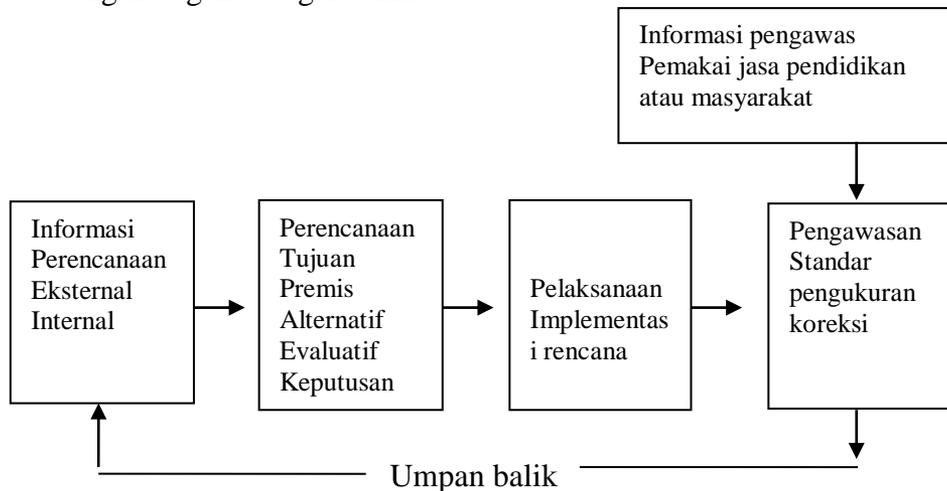
Karakteristik pokok sistem *cybernetic* adalah (1) menentukan keseimbangan (*equilibrium*); (2) menerima perubahan-perubahan di dalam lingkungan sebagai umpan balik terhadap sistem; (3) memindahkan informasi lingkungan eksternal ke dalam sistem; dan

---

<sup>24</sup> Fattah, *Landasan Manajemen...*, hlm. 103.

(4) melakukan tindakan korektif yang cepat tatkala output beroksilasi di luar batas kesadaran.<sup>25</sup>

Konsep pengawasan tipe ini lebih jelasnya akan diuraikan dengan bagan sebagai berikut:



Bagan 2.

Semua hal dan proses tersebut harus dijalani dengan sebaik-baiknya untuk menuju sebuah tujuan yaitu peningkatan mutu pendidikan Islam, baik secara internal maupun kelembagaan. Pengawasan adalah merupakan proses penetapan standar, pelaksanaan pekerjaan, pengukuran pelaksanaan dibandingkan dengan standar dan mengoreksi kesenjangan-kesenjangan maka proses pengawasan tidak akan terlaksana tanpa informasi. Jadi pada dasarnya, kecepatan dan ketepatan tindakan pengawasan atau kontrol bergantung pada macamnya informasi yang diterima.

Karakteristik informasi untuk pelaksanaan pengawasan berbeda dengan informasi yang diperlukan untuk perencanaan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan tekanan, pengawasan tekanannya pada hal yang baru saja terjadi, sedangkan perencanaan tekanannya pada masa depan. Menurut Fattah, informasi pengawasan diklasifikasikan sebagai berikut:

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 103.

- a. Pemasaran atau pemakai jasa, yaitu informasi yang berhubungan dengan kemajuan rencana kebutuhan antara lain menyangkut kuota daerah pemasaran tenaga. Informasi ini pada dasarnya adalah mengukur rencana pemasokan dengan pelaksanaan.
- b. Pabrik yaitu informasi yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan rencana keuangan organisasi. Kategorinya menyangkut tenaga, bahan-bahan dan inventaris dan persediaan barang.
- c. Personal, yaitu informasi yang berhubungan dengan tindakan pelaksanaan kerja personal.
- d. Keuangan, yaitu informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana keuangan, perputaran uang kas.
- e. Riset, pengembangan dan permesinan, yaitu informasi yang menyangkut hasil penelitian pengembangan dan teknik permesinan.<sup>26</sup>

Jadi pada intinya informasi sangat berguna dalam keberlangsungan kegiatan pengawasan atau pengendalian. Maka dari itu, agar mutu tetap bisa dijaga dengan pengendalian yang kontinue, informasi yang terkait dengan pengendalian harap dipersiapkan sejak dini dengan cara mengefektifkan sistem administrasi yang benar. Pengawasan atau kontrol yang efektif didasarkan pada sistem informasi manajemen yang efektif. MIS dapat ditetapkan sebagai metode formal untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer agar dapat melaksanakan tugas secara efektif. Nilai informasi yang diberikan oleh MIS bergantung pada kualitas, kuantitas, dapat diperoleh setiap saat, dan relevan dengan kegiatan manajemen. Informasi yang dibutuhkan manajer berbeda-beda tiap hierarkhi. Pengawasan yang efektif harus melibatkan semua tingkat manajer dari tingkat atas sampai tingkat bawah, dan kelompok-kelompok kerja. Konsep pengawasan efektif ini mengacu pada konsep pengawasan mutu terpadu atau TQC. TQC adalah sebagai suatu sistem untuk memadukan bermacam-macam kualitas (pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan) produksi, dan pemasarannya dengan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 104.

tingkat harga yang paling ekonomis tetapi dapat memberikan kepuasan bagi para pemakainya.<sup>27</sup> Di dalam dunia pendidikan, TQC akan dapat efektif jika pada setiap tingkatan pendidikan mempunyai keterpaduan, kerja sama yang baik antara kelompok kerja (guru) dan pimpinan dalam melakukan pengawasan mutu. PKG (Pusat Kegiatan Guru, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), dan KKG (Kelompok Kerja Guru) adalah tempat yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya. Maka dari itu, organisasi tersebut bisa dan mampu mengadakan pengawasan yang dapat mendorong tumbuhnya kinerja yang baik dan efektif.

Musyawarah Guru Mata Mata Pelajaran (MGMP) merupakan suatu forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten / kota / kecamatan / sanggar / gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran baik yang berstatus Pegawai Negari Sipil (PNS) maupun guru tidak tetap atau honorarium. Prinsip kerjanya adalah adalah cerminan kegiatan "dari, oleh, dan untuk guru" dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan organisasi nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, tidak mempunyai hubungan hirarki dengan lembaga lain. MGMP adalah sebuah wadah yang besar dan tersebar, mulai dari tingkat gugus, kabupaten bahkan provinsi. Tetapi walaupun demikian wadah ini bisa dikatakan kecil karena MGMP terbagi berdasarkan rumpun mata pelajaran, pengelolaannya terpisah sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung parsial, berbeda antarmata pelajaran dan tingkat cakupan daerahnya. Hal ini membuat rendahnya nilai tawar yang dimiliki wadah ini. Menghadapi hal tersebut diperlukan suatu tatanan manajemen yang dapat menyatukan satuan-satuan forum ini sehingga memperkokoh keberadaannya.

Terdapat beberapa kondisi yang harus diperhatikan jika pengawasan ini dapat berfungsi efektif, antara lain:

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 106.

- 1) Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan, dan kriteria yang dipergunakan dalam system pendidikan, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi dan produktifitas.
- 2) Sulit, tetapi standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan. Ada dua tujuan pokok, yaitu; 1) untuk memotivasi dan 2) untuk dijadikan patokan guna membandingkan dengan prestasi.
- 3) Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
- 4) Banyaknya pengawasan harus dibatasi. Artinya jika pengawasan terhadap karyawan terlampau sering, ada kecenderungan mereka kehilangan otonominya dan dapat dipersepsi pengawasan itu sebagai pengekanan.
- 5) Sistem pengawasan harus dikemudi tanpa mengorbankan otonomi dan kehormatan manajerial tetapi fleksibel, artinya system pengawasan menunjukkan kapan, dan dimana tindakan korektif harus diambil.
- 6) Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan, artinya tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar, tetapi penyediaan alternatif perbaikan, menentukan tindakan perbaikan.
- 7) Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah, yaitu: menemukan masalah, menemukan penyebab, membuat rancangan penanggulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, mencegah timbulnya masalah yang serupa.<sup>28</sup>

Intinya kontrol yang efektif harus ada kerja sama dari pihak-pihak yang terkait mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang juga dan mulai dari diri sendiri.

c. Manajemen Strategik Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Peningkatan Mutudan Daya Saing.

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 106-107.

arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Untuk itu didalam konsep ini saya akan membahas tentang konsep pendidikan yang pantas untuk karakter anak indonesia yakni “Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing” supaya dengan adanya konsep tersebut diharapkan proses pematangan peserta didik dapat berjalan dengan baik. Serta diharapkan para pengelola lembaga pendidikan mampu menjadi lembaga yang berdaya saing.

Untuk membuka tabir yang memarjinalkan pendidikan Islam, maka proses pengembangan lembaga pendidikan Islam harus terus digalakkan. Dalam hal ini, ilmu manajemen sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan mutu. Mengelola lembaga pendidikan Islam berarti melakukan proses penataan kelembagaan pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia dan non manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.<sup>29</sup> Untuk meyakinkan keraguan masyarakat terhadap lulusan dari pengelola dan penyelenggara pendidikan tentunya sekolah harus berbenah menuju perbaikan secara terus menerus sehingga nantinya mampu mewujudkan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

Masrokan dalam jurnal Efisteme menjelaskan bahwa manajemen strategik pendidikan adalah suatu proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mendasar dalam penataa kelembagaan pendidikan yang melibatkan sumber daya manusia dan non manusia dalam menggerakkannya dan memberikan control secara strategis untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.<sup>30</sup> Pendidikan bermutu dan berdaya saing adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan

---

<sup>29</sup> Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet. 2, 2014), hlm. 37.

<sup>30</sup> Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal, Efisteme, Vol 3, No 2, (Tulungagung: PPs STAIN Tulungagung, 2008), cet. 154.

cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Pendidikan yang bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik dengan materi dan sistem kelola yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, meliputi:

- a. Materi pelajaran yang baik dan harus dilakukan guna mencapai tercapainya pendidikan yang bermutu ialah materi pelajaran yang dirasakan manfaatnya oleh peserta didik, baik dirasakan langsung maupun kemudian hari, materi pelajaran tersebut harus memberikan wawasan yang bersifat meningkat secara terus-menerus, materi pelajaran tersebut harus memberikan semangat, motivasi, dan kreativitas berpikir bagi peserta didik.
- b. Perencanaan pendidikan yang baik tidak hanya dimaksudkan untuk menetak dan mempersiapkan masa depan peserta didik agar mereka dapat hidup dengan baik di zamannya, tapi juga mempersiapkan dan membekali mereka ketika manusia mwnghadap tuhan nya.
- c. Tata kelola yang baik adalah sistem tata kelola dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bersifat komprehensif atau utuh, artinya pembangunan pendidikan bukan meningkatkan anggara saja tapi juga memperhatikan kualitas guru budaya belajar peserta didik, sarana prasarana belajar, managemen pendidikan , kebijakan dan program, serta produk dan daya dukung lingkungan. Tata kelola pendidikan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antarfungsi dan peran antar komponen yang satu dengan yang lain. Tata kelola yang baik juga harus bersifat terukur, artinya uang yang diberikan oleh oleh orangtua peserta didik berubah menjadi sikap, pemikiran dan periaku yang bagaimana. Selain itu sistem tata kelola juga harus berkesinambungan, artinya memperhatikan prinsip keseimbangan antara kekuatan satu komponen dengan komponen lainnya.
- d. Pendidikan yang bermutu juga dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu paling tidak harus menguasai materi ajar, metodologi, sistem evaluasi, dan psikologi belajar. Guru yang baik bukan sekadar guru yang pintar, tapi guru yang memintarkan peserta didik. Guru yang

baik bukan sekadar guru yang berkarakter, tapi guru yang mampu membentuk karakter yang baik bagi peserta didiknya.

- e. Mengingat guru harus mampu mengembangkan pembelajaran dengan beragamnya latar belakang kemampuan, pemahaman, mengalami minat, motivasi, gaya, dan kecepatan belajar para peserta didik bisa dengan melakukan strategi pembelajaran yang efektif misalnya dengan metode mengajar berperan untuk menyinergikan beragamnya potensi atau kemampuan, minat karakteristik pengalaman, kebutuhan, kebiasaan, dan gaya belajar peserta didik, bisa juga dengan mengembangkan pola pembelajaran antara lain ketika guru mampu memosisikan peserta didik sebagai manusia yang penting, berharga, dan berkemampuan, guru juga harus mampu menguasai dan menamkan daya pengaruh dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, guru menggunakan variasi model pembelajaran yang menggabungkan sistem pembelajaran yang bersifat klasikal dengan pola belajar individual melalui pola belajar tuntas, selain itu juga perlu pengembangan sistem evaluasi.

Untuk mendukung tercapainya pola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, pimpinan lembaga pendidikan mesti melakukan langkah-langkah yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Para penyelenggara pendidikan setidaknya mampu memberdayakan lembaganya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Para penyelenggara pendidikan setidaknya mampu memberi pupuk secara tepat epada lembaga yang dianggap sehat dan mengobati lembaganya yang dianggap berpenyakit. Untuk mengetahui hal itu, para pimpinan lembaga pendidikan harus melakukan analisis secara tepat. Supaya pimpinan bisa melakukan treatment secara tepat.

Untuk memenangkan persaingan, para penyelenggara pendidikan harus memiliki spirit selalu berada di depan perubahan dengan jaminan bahwa mereka akan sampai lebih dulu digaris finis. Oleh karena itu, para penyelenggara pendidikan setidaknya memiliki sikap kompetitif dalam menjalankan tugas kelembagaannya. Misalnya memiliki komitmen untuk tetap melakukan yang terbaik dan tetap memperjuangkan keunggulan dan titik kesempurnaan, berpegang

teguh pada prinsip kejujuran, profesionalisme, dan keterpercayaan. Memiliki prinsip selalu berada di depan, visioner, cermat, penuh perhitungan, berorientasi pada prinsip-prinsip kebaikan, peka terhadap tuntunan aspirasi.

### C. Kesimpulan

Pengendalian mutu dan daya saing lembaga pendidikan Islam harus dilakukan agar eksistensi lembaga dapat dipertahankan dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan terakhir dalam proses manajemen adalah evaluasi. Evaluasi sangat bermanfaat bagi stakeholder lembaga antara lain: bagi siswa/peserta pendidikan, pengajar maupun manajemen itu sendiri.

Evaluasi pendidikan merupakan suatu tindakan untuk menilai seluruh kinerja organisasi. Penilaian ini digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap keberhasilan suatu program pendidikan. Evaluasi sebaiknya dilakukan tidak hanya di akhir periode kegiatan namun saat program sedang berjalan. Ini bias disebut sebagai pengawasan (*controlling*) agar arah pencapaian tujuan program dapat terus dipertahankan ke arah yang lebih efektif dan efisien. Ada sistem pengawasan yang disebut dengan *cybernetic*. Dalam melakukan pengawasan, *system cybernetic* memiliki empat karakteristik, yaitu: menentukan keseimbangan (*equilibrium*), menerima perubahan-perubahan di dalam lingkungan sebagai umpan balik terhadap system, memindahkan informasi lingkungan eksternal ke dalam system, dan melakukan tindakan korektif yang cepat tatkala output beresilasi di luar batas kesadaran.

### Daftar Pustaka

- Arcaro, Jarome S., *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terj. Yosai Triantara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Dimiyati dan Mudjiono: *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Kerjasama Depdikbud dan PT Rineka Cipta, 2006.

Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Federspiel, Howard M., *Kajian al-Qur`an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, trj. Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996.

[file://G:\Quraish\\_Shihab\katalog\\_al-Mizbah.htm](file://G:\Quraish_Shihab\katalog_al-Mizbah.htm), atau [http://: aulia bookstore.com/tafsir](http://aulia bookstore.com/tafsir). dan [http://:www.Lenterahati.com](http://www.Lenterahati.com).

Hamalik, Oemar: *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Kerjasama Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Bandung: CV Haji Masagung, 1990.

Malik, A. Fadjar, *Holistika pemikiran Pendidikan*, ed. Ahmad Barizi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Marno dan Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Maysaroh, Lies, *Pengingkaran Terhadap Tuhan (Makna Kufur Menurut Toshihiko Izutsu dan M. Quraish Shihab)*, tesis, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Mulyasa, E., *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Mustaqim, Abdul, *Peta Metodologis Penafsiran al-Qur`an Perode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta, Nur Pustaka, 2003.

Mutohar, Prim Masrokan, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet. 2, 2014.

\_\_\_\_\_, *Manajemen strategic dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal, Efisteme, Vol 3, No 2, Tulungagung: PPs STAIN Tulungagung, 2008.

Shihab, M. Quraish, dkk., *Sejarah dan Ulumul Qur`an*, Jakarta; Pustaka Firdaus, cet. 1 1999.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2003.

\_\_\_\_\_, *Mu`jizat al-Qur`an Di Tinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*, Bandung: Mizan, 1997.

\_\_\_\_\_, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur`an Vol. I*, Jakarta: Lentera Hati, cet. 1, 2000.

\_\_\_\_\_, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet.1, 2000.

Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Sulhan, Muwahid, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Bina Ilmu, 2005.

Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Surabaya: eLKAF, 2005.

Supardi dan Darwyan Syah, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Diadit Media, 2010.

Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Syaefudin, Udin, dan M. Abin Syamsuddin: *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: Kerjasama PPs UPI dengan PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Winardi, *Azas-Azas Manajemen*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Yusuf, Muhammad dkk *Studi Kitab-Kitab Tafsir*, Yogyakarta.